

Corporate Governance & Corporate Social Responsibility Pendukung Akuntansi

**Dr. Abd Rohman Taufiq., SE., MSA., Ak.,
CA., CSRS., CSRA., CMA., CIBA., CERA**

***CORPORATE GOVERNANCE &
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***
PENDUKUNG AKUNTANSI

**Dr. Abd Rohman Taufiq., SE., MSA., Ak., CA.,
CSRS., CSRA., CMA., CIBA., CERA**



GOOD CORPORATE GOVERNANCE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY **PENDUKUNG AKUNTANSI**

Penulis:

Dr. Abd. Rohman
Taufiq., SE., MSA., Ak.,
CA., CSRS., CSRA.,
CMA., CIBA., CERA

ISBN:

978-623-10-6288-8

Ukuran Buku:

15,5 cm X 23 cm

Tebal Buku:

v + 63 halaman

Desain Cover:

Wiko Widura

Layouter:

Ferry Wiranto, M.Si

Editor:

Muhammad Rijalus
Sholihin, S.E., M.Ak

Cetakan 1

Januari 2025

Dicetak & Diterbitkan Oleh:



MEDIA KUNKUN NUSANTARA

IKAPI : 425/JTI/2024

Queen Cempaka Blok C No 30 Kel. Gebang,
Kec. Patrang Kab. Jember-Jawa Timur
www.publishers.mediakunkun.com
E-mail: mediakunkun@gmail.com
Telp. 081559852272

SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Peraturan pemerintah tentang Perusahaan Terbatas (PT) wajib membuat *annual report* untuk mengetahui kondisi suatu PT. Salah satu *annual report* yang dibahas dalam buku ini adalah perusahaan rite diminati oleh kalangan kecil, menengah, dan atas. Buku ini membahas tentang peran CSR terhadap aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Perusahaan rite mencerminkan perputaran ekonomi masyarakat dalam hal minat belanja dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, industri rite harus mempunyai program CSR dalam hal lingkungan dan sosial masyarakat. Lingkungan sosial sangat mendukung dalam perusahaan rite, dan saling mempunyai hubungan harmonis kehidupan masyarakat.

Masyarakat dan industri rite harus mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu melestraikan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis. Hubungan harmonis itu mempunyai banyak arti, tetapi sebagai kelangsungan hidup industri dan menjalin hubungan baik kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah mempunyai peran dan kepentingan bersama dalam mewujudkan kepentingan bumi. CSR juga didukung oleh indikator pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu publikasi tahunan yang dimiliki oleh setiap instansi. Indikator pembangunan berkelanjutan baik sosial ekonomi dan lingkungan disusun berdasarkan data sesuai indikator *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan agenda dunia yang harus dicapai setiap anggaran yang disusun. Pembangunan berkelanjutan salah satu bentuk pembangunan yang lebih mengakomodir keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial serta kelestarian lingkungan. Publikasi difokuskan pembahasan indikator GCG terkait lingkungan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB 1 GOOD CORPORATE GOVERNANCE	1
BAB 2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	5
BAB 3 PENDUKUNG AKUNTANSI	15
<i>Cost of Capital</i>	23
Nilai perusahaan	25
Struktur Modal	26
Kinerja Keuangan	28
Kualitas Audit	31
BAB 4 HUBUNGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DENGAN AKUNTANSI	38
BAB 5 HUBUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN AKUNTANSI	4343
Daftar Pustaka	51
Biografi Penulis	63

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator G4	50
-----------------------------	----

BAB 1

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan perusahaan. Hubungan kondusif *stakeholder* prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. GCG akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan kepentingan pemangku lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. GCG terkait erat dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Implementasi GCG secara konsisten pada prinsip ditujukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta diterapkan untuk memperkuat daya saing perusahaan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, implementasi GCG menjadi penting untuk memenangkan persaingan bisnis dengan tetap mengedepankan persaingan.

GCG hendaknya tidak hanya dipandang sebagai sebuah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap sejumlah peraturan yang mendorong praktik dan hubungan bisnis agar penerapan GCG yang baik telah mengakomodir kebutuhan dunia usaha yang dinamis. GCG hendaknya dipandang sebagai sebuah bentuk kesadaran dan untuk menjalani persaingan bisnis yang beretika. Penerapan GCG dapat dilihat dari implementasi konsep etika. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2001 mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal.

FCGI yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan. GCG sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien. Nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Beberapa sumber tulisan yang membahas mengenai hal positif yang dapat diharapkan dari penerapan GCG dalam jangka panjang terhadap perusahaan, sebagai berikut:

1. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan efektif.
2. Mengurangi *cost of capital*, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan.
4. Menciptakan dukungan *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

GCG dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dengan menerapkan prinsip: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta Kewajaran dan kesetaraan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai etika.

Praktik GCG konsisten dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar GCG. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian pengelolaan perusahaan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran yaitu perlakuan adil dan setara para pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas. Komitmen untuk mewujudkan nilai perusahaan setiap aktivitas bisnis, menjadi penggerak utama pertumbuhan perusahaan. Komitmen mewujudkan nilai perusahaan menjadi penggerak utama pertumbuhan perusahaan dengan menerapkan nilai dan melaksanakan program dalam peningkatan mutu produk atau secara berkesinambungan dengan menerapkan strategi perusahaan.

Kombinasi antara nilai perusahaan, konsistensi penerapan program peningkatan kualitas produk atau layanan, dan untuk melakukan *continuous improvement*, serta penerapan GCG lingkup perusahaan menjadi pondasi yang kokoh bagi perusahaan untuk bertahan menghadapi segala tantangan dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dibutuhkan faktor pendukung internal dan strategi. Selain itu, untuk menyikapi setiap perubahan yang terjadi di lingkup eksternal termasuk peranan GCG dalam aktivitas keseharian secara konsisten, dan sikap integritas. Sikap integritas terwujud bila pedoman perilaku dan etika usaha yang disusun berlandaskan nilai perusahaan dalam melaksanakan misi dan visi perusahaan.

Perilaku dan etika perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang memenuhi prinsip GCG bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan dan melaksanakan peran dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Pedoman Perilaku merupakan bagian dari pelaksanaan GCG tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari oleh seluruh karyawan perusahaan sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness/keadilan). Mengingat lingkungan bisnis yang sangat dinamis, maka perlu dikaji pedoman perilaku secara berkesinambungan dalam rangka mendapatkan standar kerja yang efisien. Etika usaha merupakan standar perilaku yang diharapkan perusahaan dalam berinteraksi dan terhubung dengan pemangku kepentingan) karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, pemegang saham, media, pesaing, dan masyarakat sekitar).

Untuk menjamin kelangsungan usaha dan keberhasilan sebagai perusahaan yang kompetitif bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang etis dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkomitmen terhadap standar etika dan pelaksanaan peraturan perundangan, memahami dan mendukung pengembangan masyarakat setempat dengan menerapkan prinsip saling menghargai dan saling mengembangkan, dan mendukung pelestarian lingkungan perusahaan.

BAB 2

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep hubungan perusahaan dan masyarakat sekitar. Perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan perlu mengambil kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas CSR sehingga dengan adanya kebijakan dapat menghasilkan *annual report* berisi tentang aktivitas sosial (Lee, 2017). CSR berfungsi untuk meminimalkan pengaruh negatif dari aktivitas entitas bisnis (Lakmali, 2019). CSR sebuah gagasan salah satunya dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada *nilai perusahaan* dalam kondisi keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan. Semakin meningkatnya pengungkapan CSR yang diungkapkan, semakin besar pula tingkat pengembalian atas ekuitas (Ghauri *et al.*, 2011).

Pengungkapan CSR yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada *stakeholder* dan *shareholder* yang akan menimbulkan kepercayaan perusahaan sehingga meningkatkan laba dan ROA. Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Qiu *et al.*, 2021). Semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan. Aktivitas CSR akan menarik perhatian investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Sesuai dengan *signalling theory* bahwa ketika membuat *annual report* maka aktivitas CSR harus dicantumkan bertujuan untuk meminimalisir *nilai perusahaan* dan kinerja keuangan.

Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan proksi ROA (Brigham & Haston, 2021). Perusahaan yang melakukan

pengungkapan CSR akan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, CSR saat ini menjadi salah satu faktor penting di perusahaan, sehingga telah banyak perusahaan menerapkan kegiatan tersebut. Namun, masih banyak pula perusahaan yang kurang konsisten dalam pelaksanaan. Sehingga, manfaat dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat tersampaikan secara maksimal dan investor kurang dapat menilai baik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang *Go Public* memiliki kewajiban membuat kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yang semula hanya *voluntary disclosure* menjadi *mandatory disclosure*. CSR menjadi wajib karena perusahaan tidak hanya berorientasi kepada pemilik, tetapi juga berkewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan. Pengungkapan CSR dalam *annual report* memperkuat citra perusahaan dan salah satu pertimbangan yang diperhatikan investor (Anwar *et al.*, 2020).

Melaksanakan CSR citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyaltitas konsumen semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam jangka panjang, maka penjualan perusahaan semakin membaik dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Wang *et al.*, 2020). Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan *nilai perusahaan* peningkatan penjualan.

CSR merupakan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Peraturan pemerintah tentang Perusahaan Terbatas (PT) wajib membuat annual report bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu PT. Salah satu annual report yang dibahas dalam buku ini adalah perusahaan rite. Perusahaan rite merupakan perusahaan yang sering diminati oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan kecil,

menengah, dan atas. Buku ini akan membahas tentang peran CSR terhadap aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Perusahaan rite mencerminkan perputaran ekonomi masyarakat dalam hal minat belanja dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, industri rite harus mempunyai program CSR yang jelas dan transparan khususnya dalam hal lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Lingkungan sosial sangatlah mendukung dalam perusahaan rite, kedua belah pihak saling mempunyai hubungan harmonis terhadap kehidupan masyarakat.

Untuk itu, masyarakat dan industri rite harus mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu melestraikan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis. Hubungan harmonis itu mempunyai banyak arti, tetapi sebagai kelangsungan hidup industri dan menjalin hubungan baik kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah mempunyai peran dan kepentingan bersama dalam mewujudkan kepentingan bumi. CSR juga didukung oleh indikator pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu publikasi tahunan yang dimiliki oleh setiap instansi. Indikator pembangunan berkelanjutan baik sosial ekonomi dan lingkungan disusun berdasarkan data sebagai sumber yang dipakai untuk laporan dan insitusi lainnya yang disesuaikan dengan indikator *Sustainable Development Goal* (SDGs) merupakan agenda dunia yang harus dicapai setiap anggaran yang disusun.

Pembangunan berkelanjutan salah satu bentuk pembangunan yang lebih mengakomodir keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial serta kelestarian lingkungan. Publikasi difokuskan pembahasan indikator SDGs terkait lingkungan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pemahaman tetnan berbagai dimesti pembangunan berkelanjutan dan indikator serta interaksinya yang kompleks, sehingga dapat memajukan usaha pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penyajian publikasi ini masih jauh dari sempurna mengingat

indikator SDGs yang mencapai 241 indikator dan saat ini belum semua indikator tersebut tersedia dalam publikasi ini. Untuk itu, kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan yang akan datang dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih.

Berkembanglah konsep ekonomi hijau, sebagai konsep yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Namun mengingat tidak adanya model pembangunan berkelanjutan yang sama untuk seluruh negara, maka konsep ekonomi hijau dipahami secara berbeda pula, dengan mempertimbangkan berbagai kendala pada masing-masing negara. Ekonomi hijau dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. *United Nation Environment Programme* (UNEP) ekonomi hijau mempunyai makna untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, berbunyi:

“Greening the economy refers to the process of reconfiguring business and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities.”

Perusahaan manufaktur memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara termasuk di Indonesia dan dengan adanya persaingan di era global ini, setiap perusahaan harus dapat menghitung persaingan yang tepat di setiap perusahaan menjangkau semua sektor dan wilayah. Perusahaan juga dituntut untuk selalu menjaga nilai perusahaan agar tetap stabil, para investor akan mengawasi kinerja manajemen perusahaan, manajemen harus bekerja keras dalam meningkatkan nilai perusahaan agar dapat mensejahterakan para investor, apabila nilai perusahaan stabil dari waktu ke waktu, maka hal tersebut sangat baik digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan kebijakan perusahaan. Perusahaan harus mampu bersaing dengan para kompetitor, apabila nilai saham perusahaan di pasar modal dapat konsisten untuk terus meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan minat para investor untuk segera berinvestasi, oleh karena itu terdapat faktor yang dapat menentukan nilai perusahaan, faktor tersebut salah satunya adalah utang, adapun utang ini didapatkan dari modal para investor ataupun pihak perbankan, oleh karena itu pemanfaatan sumber modal dari hutang harus dioptimalkan agar menghasilkan profit yang banyak untuk membayarnya diwaktu yang telah di sepakati bersama.

Manajemen perlu melakukan kebijakan hutang yang sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga perusahaan tidak sampai mengalami kerugian akibat beban hutang yang terlalu besar untuk ditanggung perusahaan. Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu struktur modal, dimana struktur modal dijelaskan bahwa menjadi bagian penting yang ada di perusahaan, struktur modal dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan (Riyanto, 2001).

Manajer harus berhati-hati mengambil keputusan pendanaan bagi perusahaan yang berkaitan dengan penentuan struktur modal, karena keputusan ini dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Teori struktur modal (*capital structure theory*) diawali oleh penelitian Modigliani dan Miller (1958) yang menyatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pajak dan tidak ada biaya transaksi, struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pada perkembangan selanjutnya, Myer (1977) menjelaskan tentang teori *trade off* yaitu bahwa jika posisi struktur modal berada di bawah titik optimal maka setiap penambahan utang akan meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi

setelah melewati titik optimal, penambahan utang dapat menurunkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori *trade off* tersebut, hubungan struktur modal dan kinerja perusahaan dapat bersifat *non-linear* atau kuadratik. Ketika tingkat utang masih rendah, peningkatan utang dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena dengan utang perusahaan akan memperoleh manfaat pajak dari bunga, sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun ketika utang terus meningkat, maka kesulitan keuangan menjadi lebih mungkin terjadi. Resiko kebangkrutan menjadi lebih besar dari pada manfaat pajak yang diperoleh dari penggunaan utang, sehingga hal ini dapat menurunkan kinerja perusahaan. Memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan dari ekuitas, laba ditahan dan cadangan. Jika pembiayaan eksternal perusahaan yaitu hutang (*debt financing*). Namun untuk memenuhi kebutuhan keuangan, perusahaan harus mencari alternatif keuangan yang efektif. Kinerja keuangan akan terjadi jika perusahaan memiliki struktur modal yang optimal (Setiawan *et al.*, 2021).

Rasio yang digunakan untuk mengukur struktur modal perusahaan yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur struktur modal suatu perusahaan yang digunakan dalam hal pendanaan biaya operasional pada perusahaan tersebut. Adapun beberapa pilihan cara perusahaan ketika untuk mendapatkan modal yaitu dengan meminjam dana kepada pihak luar atau eksternal. Dengan pemenuhan modal bersumber dari dana eksternal maka akan menentukan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas, dimana hutang akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sebaliknya jika komposisi dana eksternal menjadi berlebihan maka akan ada peningkatan resiko keuangan atau meningkatkan resiko kebangkrutan apabila kondisi perusahaan tidak bagus.

Kepemilikan Institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik (Shleifer dan Vishny, 1997). Lebih lanjut Khan (2015) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan dari pihak institusi, bank, asuransi dan perusahaan investasi lainnya dan mempunyai pengaruh penting untuk meningkatkan pengawasan kinerja manajemen baik lokal maupun asing. Dari pendapat para pakar diatas dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain. Proporsi kepemilikan institusional yang besar diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan mendorong manajemen untuk menerapkan prinsip akuntansi konservatif. Kepemilikan Institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Kepemilikan Institusional memiliki banyak arti bagi perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor pihak manajemen (Moh'd et al. 1998). Dan salah satu penggerak bagi investor lain untuk aktif trading dalam pasar modal adalah kehadiran investor institusional (Setianto, 2016), yaitu pemegang saham yang berupa perusahaan asuransi, perusahaan investasi, lembaga dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya (Gillian dan Starks, 2000; Tarjo, 2008). Pengaruh kepemilikan institusional ditekan atau dikendalikan oleh besarnya investasi dalam suatu perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam mengurangi atau meminimalisir konflik keagenan yang dapat terjadi antara pemegang saham selaku *principal* dan manajer selaku agen. Apabila perusahaan merupakan milik sebuah lembaga atau institusional, maka pengawasan dan *controlling* manajer akan menjadi sangat ketat, apabila pengawasan ketat,

maka kreditor beranggapan bahwa perusahaan beresiko rendah dan berdampak pada biaya utang (*cost of debt*) perusahaan sebagai tingkat pengembalian yang diminta oleh kreditor (Swissia dan Purba, 2018). Kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan kepemilikan saham institusional terhadap total saham beredar.

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR kini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah entitas bisnis. Tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memahami sifat dan manfaat menjadi fokus perusahaan. Untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. CSR adalah salah satu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja.

Pelaksanaan kegiatan CSR akan meyakinkan investor bahwa bisnis akan dapat menjamin kelangsungan bisnis di masa depan, yang juga akan meningkatkan nilai bisnis (Murnita dan Putra, 2018). CSR dapat diukur dengan menggunakan indeks *Global Reporting Intiaative* (GRI) generasi ke 4 (G4) yang berjumlah 91 indikator kinerja dalam 3 kategori (ekonomi, ligkungan, dan sosial). (Pristianingrum, 2017). Penilaian indikator ini dengan cara memberi skor 1 jika perusahaan mengungkapkan 1 item, namun jika item tidak diungkapkan maka diberi skor 0. Adapun indikator indikator pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI G4 yang berjumlah 91 indikator yaitu:

1. Kategori ekonomi mencakup aspek yang terkait dengan kinerja keuangan, aspek yang terkait dengan keberadaan pasar, aspek yang terkait dengan dampak ekonomi tidak langsung, dan aspek yang terkait dengan praktik pengadaan.

2. Kategori lingkungan meliputi aspek material, aspek energi, aspek air, keanekaragaman hayati, aspek emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek transportasi, aspek lain, aspek lingkungan evaluasi pemasok, mekanisme pengaduan dan masalah lingkungan.
3. Kategori sosial yang dibagi menjadi beberapa Sub Kategori yaitu:
 - a. Sub Kategori Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja meliputi Aspek Kepegawaian, Hubungan Industrial, Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Aspek Pelatihan dan Pendidikan, Keberagaman dan Kestaraan Peluang, Kestaraan Remunerasi Perempuan dan Laki Laki, Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan.
 - b. Sub Kategori Hak Asasi Manusia meliputi Aspek Investasi, Non Diskriminasi, Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama, Pekerja Anak, Pekerja Paksa atau Wajib Kerja, Praktik Pengamanan, Hak Adat, Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia, Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia.
 - c. Sub Kategori Masyarakat meliputi Masyarakat Lokal, Anti Korupsi, Kebijakan Publik, Anti Persaingan, Kepatuhan, Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat.
 - d. Sub Kategori Tanggung Jawab atas Produk meliputi Kesehatan Keselamatan Pelanggan, Pelabelan Produk dan Jasa, Komunikasi Pemasaran, Privasi Pelanggan dan Kepatuhan.

CSR terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh A. Firmansyah et al., (2021) Meilinda Murnita dan Dwiani Putra, (2018), D. Firmansyah et al., (2020), Erdiana, (2019), Meilinda Murnita dan Dwiani Putra, (2018), Hapsari, (2018) dan Yuliyanti, (2019) menemukan bahwa CSR berpengaruh signifikan dan

positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Karundeng et al., (2017), dan Puspaningrum, (2017), menunjukkan bahwa CSR secara parsial tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Intial Public Offering (IPO) memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan modal tambahan yang diperlukan untuk mendukung ekspansi perusahaan, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi dan pengembangan produk baru, pada saat yang bersamaan, IPO menawarkan kesempatan kepada investor publik untuk berinvestasi di perusahaan dengan pertumbuhan yang stabil dan prospek yang baik. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah penambahan variabel moderasi yaitu *Corporate Sosial Responsibility* serta objek penelitian yang dilakukan di perusahaan manufaktur dan periode penelitian yang berbeda.

BAB 3

PENDUKUNG AKUNTANSI

Kehidupan sehari-hari, banyak sekali orang yang mempertukarkan istilah teknologi informasi dan sistem informasi seandainya, tanpa tahu perbedaan mendasar dibalik kedua istilah yang sedang trend tersebut. Ada baiknya di abad informasi ini, pengertian kedua istilah tersebut diperjelas agar tidak terjadi salah kaprah, terutama jika wakil praktisi teknologi dari Indonesia harus berbicara di forum internasional. Istilah ‘teknologi informasi’ mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Definisi kata ‘informasi’ sendiri secara internasional telah disepakati sebagai ‘hasil dari pengolahan data’ yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah.

Komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama (cikal bakal) yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi. Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, kemajuan teknologi telekomunikasi terlihat sedemikian pesatnya, sehingga telah mampu membuat dunia menjadi terasa lebih kecil (mereduksi ruang dan waktu = *time and space*). Dari sejarah ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Dengan berpegang pada definisi ini, terlihat bahwa komputer hanya merupakan salah satu produk dalam domain teknologi informasi. Modem, Router, Oracle, SAP, Printer, Multimedia, Cabling System, VSAT, dan lain sebagainya, merupakan contoh dari produk-produk teknologi informasi.

Kata ‘sistem’ mengandung arti ‘kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya’. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Dalam hal ini, teknologi informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja dalam format perusahaan. Komponen-komponen lainnya adalah: proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, rekanan, dan lain sebagainya. Secara teori, di satu titik ekstrim, suatu sistem informasi yang baik belum tentu harus memiliki komponen teknologi informasi (lihat perusahaan-perusahaan pengrajin kecil dengan omset milyaran); sementara di titik ekstrim yang lain, komputer memegang peranan teramat sangat penting dalam penciptaan produk (perhatikan perusahaan manufakturing Jepang yang mempekerjakan robot untuk seluruh proses perakitan). Jadi, kehandalan suatu sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi terletak pada keterkaitan antar komponen yang ada, sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan suatu informasi yang berguna (akurat, terpercaya, detil, cepat, relevan) untuk lembaga yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dewasa ini telah mendorong semakin majunya teknologi komputer. Dunia usahapun dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan yang terjadi, dengan terus melakukan perbaikan atas strategi dan operasi perusahaan agar tetap dapat bertahan dalam kompetisi yang semakin ketat. Salah satu unsur strategi bagi organisasi bisnis adalah olah data. Setiap perusahaan harus dapat melakukan olah data keuangan secara cepat dan akurat guna menunjang pengambilan keputusan bisnis perusahaan tersebut.

Dampak kemajuan teknologi informasi secara signifikan telah mempengaruhi praktik akuntansi dan keuangan. Telah terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam olah data akuntansi, yaitu dari sistem akuntansi manulisasi ke sistem komputerisasi. Hal yang sama juga terjadi terhadap olah data keuangan yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. Dengan demikian dunia usaha akhirnya tidak hanya sekedar membutuhkan tenaga trampil yang memahami konsep dasar akuntansi dan manajemen keuangan tetapi juga penguasaan atas alat bantu yang dinamakan komputer.

Perkembangan teknologi informasi memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Beragam program aplikasi akuntansi terpadu telah tersedia, seperti *DacEasy Accounting* (DEA), *MYOB Accounting*, *Peachtree Accounting* dan *ZAHIR* yang merupakan pilihan terbaik untuk komputerisasi data akuntansi pada bisnis skala kecil dan menengah. Namun demikian tidak seperti program aplikasi akuntansi yang sudah ada di pasaran, hingga saat ini hampir tidak ada program yang secara spesifik dibuat untuk olah data keuangan yang sesuai dengan praktik bisnis di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena proses manajemen keuangan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan akuntansi internasional.

Microsoft Excel merupakan salah satu program spreadsheet terpopuler dan tercanggih saat ini. Excel banyak berperan dalam pengelolaan informasi, khususnya data terbtuk angka untuk penghitungan, proyeksi, analisis, dan presentasi. Berkemban pesatnya teknologi informasi, khususnya computer, dan semakin berkembangnya manajemen keuangan, menuntut adanya pengelolaan data yang semakin cepat. Penggunaan komputer telah menjadi suatu keharusan. Berbagai fungsi dan fasilitas yang dimiliki Excel memungkinkan untuk olah data dalam berbagai kasus untuk pengambilan keputusan bisnis.

Evolusi adalah sebuah skenario perubahan secara perlahan-lahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena paradigma “*people do not like to change*” dan “*old habit is hard to die*”. Proses gradual ini tentu saja akan mengurangi resiko kegagalan akan penerapan sebuah lingkungan baru karena sifatnya yang lebih terbuka dan tidak terlalu ofensif. Berlawanan dengan evolusi, adalah sebuah proses perubahan yang sangat cepat atau revolusioner dimana manajemen atau karyawan yang tidak siap akan diterapkannya sebuah lingkungan baru akan tersingkir. Penerapan sebuah sistem informasi pada perusahaan pada dasarnya akan merubah pola kerja atau aktivitas kegiatan perusahaan sehari-hari. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Scott and Morton *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) membagi jenis-jenis perubahan menjadi lima bagian besar yang dapat dipergunakan oleh manajemen maupun praktisi teknologi informasi dalam menyusun strategi yang sesuai untuk masing-masing perusahaan, agar penerapan sistem informasi dapat berlangsung secara efektif.

Era modern yang serba dinamis ini, organisasi seperti perusahaan berusaha untuk selalu berubah dari waktu ke waktu. Semboyan “*today has to be better than yesterday*” berusaha untuk ditanamkan ke seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Sistem informasi sebagai salah satu komponen utama perusahaan modern juga tidak lepas dari tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerjanya. Perkembangan teknologi informasi yang kecepatannya eksponensial saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan yang ingin selalu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Ada satu masalah yang kerap diperdebatkan antara praktisi teknologi informasi dan manajemen: perubahan semacam apakah yang cocok diterapkan di perusahaan.

Manajemen organisasi, perubahan secara evolusioner (perlahan-lahan) yang cenderung dipilih, berlawanan dengan pendekatan perubahan revolusioner yang cocok diterapkan jika ingin selalu memanfaatkan teknologi informasi terbaru. Para pakar teknologi informasi dari *Sloan School of Management* di MIT memberikan suatu kerangka yang dinamakan “MIT ’90 Five Layer Model” untuk membantu manajemen perusahaan dalam mencermati permasalahan ini (Scott-Morton, 1991). Dalam menganalisa permasalahan ini, mereka mencoba melihat dari dua buah sisi: besarnya manfaat atau benefit yang akan didapatkan perusahaan, dan tingkat perubahan manajemen internal perusahaan yang harus dijalani (*business transformation*).

Jenis perubahan pertama disebut sebagai “localised exploitation” karena wilayah perubahan hanya terjadi di sebuah fungsi atau departemen di dalam organisasi. Katakanlah Divisi SDM ingin menerapkan Sistem Aplikasi Personalia sebagai pengganti sistem manual yang saat ini dipergunakan. Otomatis proses dan prosedur baru sehubungan dengan diimplementasikannya aplikasi ini hanya diperuntukkan bagi para karyawan di Divisi SDM tersebut. Dampaknya pun secara langsung hanya akan dinikmati oleh divisi yang bersangkutan, tidak secara signifikan berpengaruh ke seluruh fungsi yang ada di perusahaan. Dari segi resiko, perubahan ini dapat secara “aman” dilakukan karena ruang lingkupnya yang terbatas.

Jenis perubahan kedua yang dikenal dengan istilah “internal integration” merupakan perubahan yang terjadi, dimana tujuan utama adalah untuk melakukan integrasi antar fungsi-fungsi atau departemen yang ada dalam perusahaan. Teori organisasi modern, perusahaan yang ingin berkembang saat ini harus merubah filosofi cara memandang aktivitas internal perusahaan, dari yang berbasis hirarki untuk keperluan manajemen internal, menjadi berbasis proses yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Penerapan Sistem Informasi lembur karyawan yang secara langsung akan berdampak pada paling tidak tiga direktorat perusahaan, yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Keuangan, dan Direktorat Operasi. Seorang karyawan yang lembur kerja di daerah pertambangan, harus memperoleh ijin kerja lembur dari supervisornya (Direktorat Operasi), dimana besarnya uang lembur dan jumlah jam lembur akan ditentukan dan dikelola oleh manajer personalia (Direktorat SDM), dengan pembayaran uang lembur yang akan ditangani oleh staf bagian penggajian karyawan. Secara langsung, pengenalan aplikasi baru ini akan merubah cara kerja beberapa direktorat sekaligus. Proses dan prosedur kerja secara efisien dan efektif akan tercapai jika ketiga direktorat di atas terintegrasi dengan baik. Untuk jenis perubahan “internal integration” ini, manfaat yang didapatkan akan lebih besar dibandingkan dengan “localised exploitation” karena sudah melibatkan beberapa fungsi dalam organisasi.

Demikian pula dengan resiko yang dihadapi akan lebih besar, mengingat mengintegrasikan beberapa buah fungsi organisasi yang memiliki karakteristik dan obyektivitas berbeda bukanlah suatu hal yang mudah. Jenis perubahan berikutnya yang sangat populer saat ini adalah “business process redesign” atau yang lebih dikenal dengan BPR atau “Business Process Reengineering”. Michael Hammer dan James Champy dengan kerangka value chain Michael Porter, telah mengadakan perubahan dan secara mendasar. Perusahaan akan melakukan transformasi besar-besaran di sini, maka resiko yang dihadapi juga sangatlah besar. Tercatat dalam statistik terakhir bahwa 80% dari program BPR mengalami kegagalan. *High risk high return* mengatakan, dari 20% perusahaan yang berhasil menjalani program BPR dengan sukses, manfaat atau benefit yang diperoleh pun tidak kepalang tanggung! Ada yang sanggup meningkatkan *revenue* hingga 100%, ada yang langsung menjadi market leader, ada yang frekuensi transaksi dan volume penjualannya meningkat sangat tajam, dan keberhasilan lainnya.

Sistem Informasi Korporat lain merupakan salah satu komponen utama (*change driver*) yang memicu perusahaan untuk melakukan program BPR. Sebutlah aplikasi seperti SAP, BAAN, Oracle, People Soft, yang merupakan perangkat lunak paling laku di pasaran. Perubahan mendasar yang dimaksud dalam BPR adalah tidak hanya membatasi diri pada pembagian fungsi atau proses di dalam perusahaan, tetapi lebih dari itu. Bahkan ada perusahaan yang harus mendefinisikan ulang bisnis yang akan digelutinya (visi dan misi usaha).

Business Network Redesign adalah suatu jenis perubahan yang mulai menjadi fenomena di abad globalisasi informasi saat ini. Perusahaan akan sukses di masa-masa ini jika menspesialisasikan diri pada suatu proses tertentu (fokus). Dalam proses penciptaan produk atau jasa yang ditawarkan, tentu saja banyak sekali rekanan bisnis (*business partners*) yang diajak untuk bekerja sama, baik secara langsung (sebagai supplier bahan mentah, pendistribusi produk, agen pemasaran, dsb.) maupun tidak langsung (pemasok alat-alat kantor, kebutuhan sehari-hari karyawan). *Collaboration For Competition* merupakan hal yang menjadi sangat umum saat ini dimana kunci keberhasilannya adalah terletak pada jaringan yang dimiliki suatu perusahaan dengan rekanan bisnisnya. Biasanya yang terjadi pada perubahan ini adalah masalah komunikasi antar rekanan bisnis.

Produk-produk teknologi informasi berbasis internet, intranet, dan ekstranet merupakan tulang punggung dalam jaringan kerja ini. Tentu saja derajat transformasi yang akan dialami perusahaan akan semakin besar, karena bisa dibayangkan tingkat kompleksitas penyusunan proses dan prosedur untuk beberapa perusahaan yang ingin bekerja dalam proses penciptaan produk-produk baru. Lepas dari resiko kegagalan yang cukup “tinggi”, keberhasilan menjalin jaringan bisnis secara efektif akan mendatangkan dampak positif yang signifikan untuk masing-masing perusahaan yang bekerjasama.

Jenis perubahan terakhir yang risikonya tertinggi namun dampak yang dihasilkan akan sangat besar adalah “*business scope redefinition*”. Perubahan ini disebabkan karena kemajuan teknologi informasi yang tercanggih (state-of-the-art) menawarkan kesempatan (*opportunity*) baru bagi perusahaan untuk menciptakan jenis- jenis produk atau pelayanan yang lain dari pada yang lain. Namun syarat utamanya adalah bahwa bisnis harus mengikuti teknologi informasi, bukan sebaliknya. Seorang praktisi manajemen mengatakan: “Mungkin baru di era ini seseorang dapat menjalankan bisnis atau usahanya tanpa harus memiliki asset seperti tanah, gedung, peralatan kantor, atau bahkan karyawan! Dengan berbekal seperangkat Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan jaringan internet, seorang individu sudah dapat menawarkan produknya ke sekian juta calon pelanggan di seluruh dunia...”. Tengoklah seorang Amerika yang hanya berbekal ruangan 3x3 meter persegi dapat menghasilkan pendapatan individu sebesar US\$10,000 per bulan hanya dengan menjalankan bisnis perantara pengiriman bunga di seluruh dunia. Sudah banyak perusahaan yang melakukan transformasi besar-besaran dengan menggunakan kerangka manajemen perubahan “*business scope redefinition*”. Bank internet pertama lahir di benua Eropa dimana bank yang bersangkutan “benar- benar” tidak memiliki gedung untuk menjalankan bisnisnya.

Tentu saja risikonya cukup besar, karena selain harus merubah cara berfikir (mindset) dalam melihat kesempatan bisnis di cyber space, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat harus selalu dapat diantisipasi oleh perusahaan tersebut dengan cara mengadaptasikannya secepat mungkin. Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa akan menjamurnya perusahaan yang mentransformasikan dirinya menjadi perusahaan pelayanan murni, dimana secara internal manajemen dan stafnya (dengan jumlah armada yang relatif sedikit) hanya akan berfungsi mengatur perjalanan produknya (*flow of goods*) dari satu tempat ke tempat lain, sampai ke tangan pelanggan.

Para pakar dari MIT mengusulkan pendekatan evolusi untuk dua jenis perubahan yang pertama, dan pendekatan revolusi untuk tiga manajemen perubahan terakhir. Namun tentu saja hal ini tidak mutlak untuk dilakukan, tetapi baik sebagai pertimbangan karena didasarkan pada pengalaman beberapa perusahaan. Kunci mengelola perubahan adalah terletak pada pola pikir (mindset) dari seluruh SDM perusahaan yang terlibat. Agak sulit, terutama bagi negara berkembang, untuk memahami pola pikir manajemen perubahan seperti BPR yang sangat populer di negara-negara maju. Faktor utamanya adalah kesiapan SDM dalam menghadapi perubahan drastis tersebut. Tidaklah aneh jika fenomena yang terjadi di negara berkembang cenderung pada perubahan yang bersifat evolusioner sebagai konsekuensi masuknya teknologi informasi sebagai salah satu komponen penting abad ini. Dan tentu saja, kemauan dan kesediaan untuk berubah “*willingness to change and to act*” merupakan kunci lainnya di samping pola pikir baru yang harus mulai ditanamkan di kepala para generasi muda penerus. Mengapa generasi muda? Karena banyak para pengambil keputusan saat ini (terutama di negara berkembang) tidak mau aktif dalam mempelajari kemajuan teknologi.

Cost of Capital

Cost of capital merupakan tingkat diskonto yang digunakan untuk mencapai *return* minimum yang diproyeksikan berdasarkan *Net Present Value* (NPV) yang diperhitungkan (William, 2018). Selain itu, *cost of capital* sebagai tingkat pengembalian yang diharapkan dapat diperoleh dari dana yang ditanamkan. Oleh karena itu, perhitungan *cost of capital* perusahaan menggunakan angka *cost of debt* dan *cost of equity* (Chen & Zang., 2021). *Rate of return* yang diperoleh perusahaan harus lebih besar daripada *cost of capital* secara historis.

Semakin besar *cost of capital* maka semakin tinggi kewajiban perusahaan untuk menggunakan hutang. Semakin tinggi *cost of capital*, semakin besar manfaat pajak (Miller., 2021). Perusahaan yang menggunakan hutang memberikan sinyal positif untuk meningkatkan pertumbuhan. *Cost of capital* dipergunakan sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengumpulkan dana untuk investasi. Teori informasi asimetri menyatakan bahwa manajemen memiliki lebih banyak informasi daripada investor. Pasar memberikan penilaian positif terhadap tingginya *cost of capital* yang menandakan bahwa return yang akan diperoleh perusahaan akan lebih besar (Raimo *et al.*, 2020).

Penurunan *cost of capital* dapat meningkatkan nilai perusahaan (Gomes *et al.*, 2019). Penurunan *cost of capital* dapat mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan jangka panjang. Selain itu, terdapat hubungan linier antara *cost of capital* dengan nilai perusahaan (Bhatnagar *et al.*, 2019). Hubungan linieritas ini mempunyai sinyal positif dan signifikan dalam ruang lingkup perusahaan. Oleh karena itu, *cost of capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Jezkova *et al.*, 2020).

Cost of capital menjadi tingkat batas pencapaian investasi sebelum meningkatkan kekayaan pemegang saham. *Cost of capital* penting dalam pembelanjaan perusahaan, karena digunakan untuk menentukan besarnya biaya dalam memperoleh modal dari berbagai sumber. *Cost of capital* semakin kecil maka akan memaksimalkan laba dan mempengaruhi tinggi nilai perusahaan (Jezkova *et al.*, 2020). *Cost of capital* tidak terlalu dikontrol oleh manajemen dan diperlukan sebagai arus modal kerja bersih (Samuel *et al.*, 2017).

Cost of capital dihitung berdasarkan basis pajak, karena arus kas setelah pajak yang relevan untuk keputusan investasi (Kurniasih, 2022). Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, tentu akan mengontrol *cost of capital* dengan maksimal untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan segera signifikan (Qie, *et al.*, 2021). Nilai perusahaan dan *cost of capital*

disediakan perusahaan bertujuan untuk mengontrol dan menginformasikan kepada pihak eksternal bertujuan untuk saling memberikan respon positif (Brigham & Haston, 2021).

Signalling theory menggambarkan tindakan yang dilakukan manajemen untuk memberikan sinyal informasi mengenai prospek perusahaan (Brigham & Haston, 2021). Informasi yang dipublikasi merupakan pengumuman yang memberikan sinyal bagi investor untuk mengambil keputusan terkait *cost of capital* (Haston, 2018). Teori ini meyakinkan perusahaan untuk memberikan informasi sinyal positif dengan menurunkan *cost of capital* (Zahro, 2019). Penurunan *cost of capital* juga dapat meningkatkan *nilai perusahaan* (Kurniasih, 2022). *Cost of capital* berpengaruh positif terhadap *nilai perusahaan* karena mempunyai hubungan linier (Jezkova *et al.*, 2020).

Nilai perusahaan

Nilai perusahaan sebagai evaluasi investor terhadap keberhasilan kinerja perusahaan dalam *annual report* perusahaan (Khosravi *et al.*, 2019). Harga saham dapat meningkatkan *nilai perusahaan*. Hal ini meningkatkan kepercayaan pasar dan prospek perusahaan di masa depan (Hulk *et al.*, 2019). *Nilai perusahaan* salah satu *tools* yang dipakai *stakeholders* untuk melihat tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian kinerja. *Nilai perusahaan* diukur menggunakan Tobin's Q mengenai fenomena aktivitas perusahaan (Heder & Priyadi, 2017). Hal ini dikarenakan Tobin's Q dapat melihat nilai masa depan perusahaan (Hagg & Scheutz, 2019).

Pengukuran nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q sebagai *proxy*, dimana nilai pasar saham dibandingkan dengan total aset (Wang & Huang, 2018). Tujuan utama perusahaan menurut *theory of the firm* adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau *value of the firm* (Marcelino & Harsono, 2017).

Nilai perusahaan mengacu pada harga saham. Ketika membuat keputusan, manajer keuangan perlu memutuskan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Keputusan yang tepat dapat meningkatkan harga saham perusahaan dengan meningkatkan nilai perusahaan sebagai prospek perusahaan (Marcelino, 2019).

Kinerja keuangan harus mendukung nilai perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi (Sheikh, 2019). Nilai perusahaan juga bisa dibut dalam pengambilan keputusan terkait dengan penanaman modal. Perolehan modal perusahaan akan meningkat apabila perusahaan memiliki nilai perusahaan yang maksimal dan signifikan (Kurniasih, 2021). Informasi yang dipublikan tentang perolehan modal perusahaan berdasarkan informasi sinyal positif. Informasi yang dipublikasi memberikan sinyal bagi investor untuk mengambil keputusan terkait nilai perusahaan (Haston, 2018).

Struktur Modal

Struktur modal mengacu pada komposisi sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Hal ini mencerminkan bagaimana perusahaan memperoleh dana dari sumber internal dan eksternal dan bagaimana dana tersebut diperuntukkan dalam bentuk utang dan ekuitas. Secara umum, ada dua komponen utama dalam struktur modal, diantaranya: pertama, utang adalah sumber pendanaan yang diperoleh perusahaan melalui peminjaman dari pihak ketiga (bank, lembaga keuangan, atau penerbitan obligasi). Utang harus dikembalikan dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Contoh instrumen utang termasuk pinjaman bank, obligasi, atau hipotek. Dalam struktur modal, semakin tinggi proporsi utang dalam total modal, semakin tinggi risiko keuangan perusahaan karena kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang.

Kedua, *equity* mencakup modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan dan laba ditahan yang dihasilkan dari kegiatan bisnis. Ekuitas dapat berasal dari modal saham yang diperoleh melalui penjualan saham kepada pemegang saham atau melalui kontribusi modal dari pemilik. Keuntungan perusahaan juga dapat dibiarkan dalam perusahaan sebagai laba ditahan untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan masa depan. Ekuitas memberikan pemegang saham hak kepemilikan dan partisipasi dalam keputusan perusahaan. Semakin tinggi proporsi ekuitas dalam struktur modal, semakin besar kontrol dan partisipasi pemilik dalam perusahaan.

Penting untuk dicatat bahwa struktur modal yang optimal dapat bervariasi antara perusahaan dan industri. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan tentang struktur modal meliputi:

- a. Risiko bisnis: Industri yang memiliki risiko yang tinggi cenderung memiliki struktur modal yang lebih konservatif dengan proporsi utang yang lebih rendah.
- b. Profitabilitas: Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan laba yang stabil dapat lebih mudah memperoleh pendanaan eksternal dengan biaya yang lebih rendah.
- c. Siklus hidup perusahaan: Perusahaan yang baru didirikan mungkin mengandalkan lebih banyak ekuitas daripada utang karena kurangnya sejarah keuangan yang mapan.
- d. Kebijakan perpajakan: Pertimbangan perpajakan juga dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan, karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pemilihan struktur modal yang tepat penting untuk mengoptimalkan biaya modal, risiko keuangan, dan nilai perusahaan. Ini juga mempengaruhi hubungan dengan kreditor, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. Saat ini pengungkapan CSR sebagai bentuk

tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu keharusan, jika dikaitkan dengan *signaling theory*, tanggungjawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan *stockholders*. CSR sebagai sebuah gagasan salah satunya dihadapannya pada tanggungjawab sosial yang berpijak pada nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan yang akan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Semakin meningkatnya pengungkapan CSR yang diungkapkan, semakin besar pula tangka pengembalian atas ekuitas (Kurniasih, 2021). Pengungkapan CSR yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada *stakeholder* dan *shareholder* yang akan menimbulkan kepercayaan pihak tersebut untuk menerima produk perusahaan sehingga meningkatkan laba dan ROE perusahaan. Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Haston, 2018). Ini berarti berarti semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan keseluruhan kondisi keuangan perusahaan (Bhunia *et al.*, 2011). Kinerja keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sumber daya terhadap aktivitas operasional selama periode tertentu. Pengukuran yang digunakan dalam kinerja keuangan adalah ROE dan ROA (Katchova & Enlow, 2017). Semakin besar ROE dan ROA maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Kinerja keuangan yang meningkat akan memberikan pengaruh terhadap *nilai perusahaan* (Kaaro, 2020). Kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *nilai perusahaan*. Perusahaan dengan ROA positif dapat meningkatkan nilai pemegang saham dan sinyal untuk berinvestasi (Helm *et al.*, 2019). ROA yang tinggi mencerminkan efektivitas penggunaan aset dalam memenuhi kepentingan *shareholder*.

Kinerja keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *nilai perusahaan* (Wang, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik kinerja keuangan maka kemungkinan akan terjadi kenaikan pula terhadap *nilai perusahaan*. Investor melakukan *overview* suatu perusahaan dengan melihat rasio keuangan karena sebagai alat evaluasi investasi. Investor melihat seberapa besar perusahaan menghasilkan return atas investasi dengan melihat rasio profitabilitas (ROA dan ROE). Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya menjadikan perusahaan semakin diminati investor, karena tingkat keuntungan akan semakin besar. Kinerja perusahaan yang meningkat akan turut meningkatkan nilai perusahaan.

Kinerja keuangan menjadi salah satu aspek penilaian yang fundamental mengenai kondisi perusahaan (Christini, 2019). Calon investor dalam berinvestasi mempertimbangkan hal yang berhubungan dengan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar keputusan berinvestasi. Baik buruknya kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu indikator yang dipergunakan oleh investor untuk menilai suatu perusahaan termasuk harga saham di bursa efek. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka semakin tinggi pula *return* yang diperoleh investor. Investor akan berusaha mencari perusahaan yang kinerjanya baik dan menanamkan modal ke perusahaan tersebut untuk membeli saham. Dapat dikatakan perolehan modal perusahaan akan meningkat apabila perusahaan memiliki reputasi baik yang tercermin dalam laporan keuangan (Wang, 2022).

Kinerja keuangan juga menjadi faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Tingkat keuntungan dalam kinerja keuangan yang dicapai perusahaan tersebut semakin baik maka akan berpengaruh positif dalam meningkatkan *nilai perusahaan* (King & Wang, 2020). Terbukti bahwa jika penawaran tinggi maka akan meningkatkan permintaan. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat keuntungan akan semakin besar.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal (Lindlbauer *et al.*, 2016). Kinerja juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk dapat memproduksi barang dan jasa sesuai dengan target yang sudah ditentukan (Sgala, *et al.*, 2005). Kinerja juga memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya sebagai hasil tetapi juga proses kerja secara langsung seperti apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Sekhon, 2011).

Selain itu kinerja juga bisa diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atas terselesainya sebuah kegiatan yang berhubungan dengan hasil yang baik. Kinerja pada umumnya selalu dikaitkan dengan kompetisi, konsentrasi, efisiensi, produktivitas, dan kemampuan untuk dapat menghasilkan keuntungan seperti *return on investment* (ROA) (Anthon and Svarre, 2008).

Kinerja juga ditetapkan sebagai standar yang berdasarkan potensi yang dimiliki perusahaan. Untuk itu kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu: kinerja individu dan kinerja organisasi (Liung *et al.*, 2015). Kinerja individu merupakan hasil kinerja pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu.

Kinerja juga dapat dikaitkan dengan informasi laporan keuangan seperti arus kas perusahaan yang digunakan untuk menentukan keputusan ekonomi dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang disebut dengan penilaian kinerja (Tuningrat *et al.*, 2012). Penilaian kinerja menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Penilaian kinerja juga dapat menunjang strategi perusahaan untuk menghasilkan kinerja *financial* maupun *non financial* (Boyd, 2000). Dengan adanya penilaian kinerja perusahaan dapat mengetahui mana strategi yang menguntungkan dan mana strategi yang tidak memberikan manfaat bagi perusahaan. Pengukuran kinerja *financial* perusahaan tidak cukup digunakan sebagai informasi yang bersifat jangka panjang (Kotler, 2004), sedangkan kinerja *non financial* lebih objektif untuk dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja yang dapat diukur dari berbagai macam perspektif, diantaranya: *customer perspective*, *internal business perspective*, *learning and growth perspective* (Rickards, 2007).

Kualitas Audit

Kualitas audit bukan merupakan informasi publik dan tidak dapat diobservasi secara langsung oleh pengguna laporan keuangan eksternal (Balsam *et al.*, 2017). Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan mengasosiasikan kualitas audit berdasarkan reputasi auditor. Kantor Akuntan Publik (KAP) Big N berbedakan dengan auditor yang lain dengan cara berinvestasi lebih pada reputasi modalnya dan dipandang sebagai kualitas audit yang lebih tinggi berdasarkan lainnya. Investor yang menggunakan auditor memiliki kualitas yang lebih tinggi, karena auditor memiliki karakteristik yang berhubungan dengan kualitas audit (Krishnan, 2018).

Kualitas audit tidak dapat diukur dengan suatu proksi tertentu yang mewakili gambaran secara utuh (Balsam *et al.*, 2019). Auditor menawarkan sebagai tingkat kualitas audit sebagai respons adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit (Watts & Zimmerman, 1986). Auditor Big N selalu mengadakan pelatihan karyawan dan pengembangan hubungan industri dibandingkan auditor Non Big N (Tylor *et al.*, 2019). Big-N lebih banyak berinvestasi pada teknologi informasi dan menggunakan teknik fisik yang lebih maju untuk mendeteksi *earnings management* dibandingkan auditor Big N (DeFond *et al.*, 2018).

Auditor yang memiliki spesialisasi berkedudukan yang lebih baik untuk bernegosiasi dengan klien dibandingkan tidak spesialisasi. Pengukuran *Earning Response Coefficient* (ERC) yang dilakukan Big N terkait dengan kualitas audit (Wong, 2019). Auditor dengan spesialisasi industri cenderung mendapatkan *audit fee* yang lebih tinggi dibandingkan auditor tanpa spesialisasi (Mayhew & Wilkins, 2019). Ini memberikan interpretasi bahwa auditor dengan spesialisasi industri menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan auditor tanpa spesialisasi industri. Prestasi investor mengenai kualitas laporan keuangan atau *ex-ante cost of equity capital* berhubungan dengan kualitas audit.

Pengetahuan auditor terhadap klien mampu meningkatkan penilaian resiko audit dan pengetahuan audit yang diharapkan, sehingga membantu auditor mengantisipasi kemungkinan opini audit yang salah. Kemampuan untuk memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak *client-specific knowledge* dan industri sangat penting untuk mendeteksi salah saji laporan keuangan pada industri tertentu. Auditor dengan spesialisasi industri mampu meningkatkan informasi akurat, sehingga mengurangi resiko informasi yang dihadapi *client* (Owhoso *et al.*, 2019).

Selain mempunyai fungsi yang diatur dalam pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan, audit lingkungan juga memiliki manfaat baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial, diantaranya adalah mengidentifikasi risiko lingkungan, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibuthkan dalam proses pengauditan, dan lain sebagainya. Selain itu audit lingkungan juga memiliki sasaran seperti pengembangan kebijakan lingkungan, penataan terhadap regulasi, lisensi, dan standar, *review* tentang tindakan manajemen dan operasi, serta minimalisasi risiko lingkungan. Prinsip audit lingkungan sudah lama dipublikasikan sejak perangkat audit lingkungan mulai diterapkan.

Audit lingkungan memiliki sembilan prinsip, yaitu dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, periodeik dan objektif; dilaksanakan secara sukarela seogai upaya internal untuk memperbaiki kinerja; merupakan bagian dari manajemen dan perangkat manajemen untuk mengendalikan kegiatan usahanya; ditujukan untuk mengidentifikasi risiko lingkungan di masa mendatang; merupakan suatu pengamatan sesaat bersifat komprehensif, rinci, dan menggunakan protokol audit lingkungan yang memadai; pelaksanaan perlu mendapat dukungan manajemen; dokumen audit bersifat rahasia kecuali ditentukan oleh penanggung jawab; serta pelaksana audit harus mengikuti kode etik auditor lingkungan. Audit lingkungan memerlukan tata laksana dan metodologi yang rinci. Metodologi yang digunakan di dalam audit lingkungan harus fleksibel sehingga tim auditor dapat menerapkan teknik-teknik yang tepat. Aspek ini dikaji kegiatan audit lingkungan yang berupaya mengidentifikasi risiko dan meminimisasi dampak kegiatan terhadap lingkungan, penembangan pendekatan preventif dan penyelesaian masalah pada sumber dampak.

Peranan dari pelaksanaan audit lingkungan yaitu dapat dijadikan bahan utaman laporan lingkungan; penghematan sumber daya; memperbaiki efisiensi, peningkatan output; mencegah dan mengurangi risiko lingkungan; dan meningkatkan citra perusahaan serta *green customer*. Banyak faktor yang dapat menghasilkan program audit lingkungan yang berhasil. Beberapa diantaranya adalah mendapat dukungan pihak pimpinan/manajemen, keikutsertaan semua pihak yang terkait, menerapkan asas kemandirian dan objektivitas dari auditor, dan menyepakati tata laksana dan lingkup audit.

Sebagaimana halnya definisi-definisi lain yang berlaku, selalu akan ada perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terminologi audit lingkungan. Masing-masing organisasi atau negara memiliki kepentingan untuk memberikan penekanan terhadap definisi yang mereka gunakan. Terdapat banyak definisi tentang audit lingkungan atau environmental audits dan tidak perlu ada suatu kesepakatan yang kaku ataupun universal atas suatu definisi audit lingkungan di dalam berbagai literatur. Namun demikian, definisi-definisi tersebut memiliki intisari yang serupa. Sebagai contoh, di bawah ini terdapat beberapa definisi sebagai berikut.

Environmental auditing is a systematic, documented, periodic, and objective review by regulated entities, of facility operations and practices related to meeting environmental requirements.... (US EPA, Environmental Auditing Policy Statement, 1986) (Cheremisinoff et al., 1993, h 16). EMS audit: systematic, documented verification process of objectively obtaining and evaluating audit evidence to determine whether an organization's environmental management system conforms with the environmental management system audit criteria, and communicating the result of this process to the client (Guidelines for environmental auditing- auditing of EMSs, Interum Australian/New Zealand Standard, 1996).

Cahill (1996, h 22) menyebutkan bahwa usaha mendefinisikan audit lingkungan secara persis tidak mudah. Hal ini karena konsep ini masih terus berkembang dan sebagai alat manajemen formal. Hal ini harus disesuaikan dengan organisasi yang melakukannya. Hal lainnya adalah karena program audit dirancang untuk memenuhi salah satu atau beberapa tujuan seperti:

- 1) Memastikan pentaatan terhadap peraturan.
- 2) Menentukan tanggung jawab suatu organisasi.
- 3) Melindungi tanggung jawab pegawai tingkat tertentu dalam suatu perusahaan.
- 4) Menemukan fakta-fakta pada saat akusisi atau perluasan usaha.
- 5) Penelusuran dan pelaporan biaya pentaatan.
- 6) Transfer informasi di antara unit-unit operasi.
- 7) Meningkatkan kepedulian lingkungan.
- 8) Penelusuran tanggung jawab para manajer terhadap lingkungan.

Berdasarkan tujuan tersebut, menurut Cahill (1996), US EPA membatasi definisi audit lingkungan. Menurutnya, secara sederhana, suatu program audit adalah suatu proses verifikasi. Audit tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem manajemen lingkungan yang sudah ada di dalam suatu perusahaan tetapi justru untuk memverifikasi sistem tersebut bahwa sistem itu ada dan berjalan. Audit lingkungan adalah suatu kaji ulang yang obyektif terhadap suatu kegiatan usaha dalam kondisi terbangun ataupun tidak, atau suatu usaha, apakah dalam kondisi aktif ataupun tidak aktif. UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

SNI 19-19011-2005 sebagai berikut: ‘proses yang terdokumentasi, sistematis, dan mandiri untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi’ (SNI 19-19011-2005). Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang lebih dahulu dibuat dan terdapat di dalam pedoman pelaksanaan audit lingkungan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1994, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, bahwa audit lingkungan adalah: “suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.” Kemudian pada tahun 2001 Kepmen LH tersebut direvisi menjadi Kepmen LH No.30 Tahun 2001 yaitu pedoman pelaksanaan audit lingkungan wajib, dan pada tahun 2010, Kepmen tersebut direvisi menjadi Permen LH Kepmen LH No.17 Tahun 2010, serta pada tahun 2013 direvisi lagi menjadi Kepmen LH No.03 Tahun 2013 tentang audit lingkungan yang sifatnya sukarela, di mana definisi Audit Lingkungan menjadi:

“Evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”

“Audit lingkungan adalah suatu proses verifikasi secara sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh data dan mengevaluasi bukti secara obyektif untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan yang dibuat oleh organisasi sesuai dengan kriteria audit sistem manajemen lingkungan yang dibuat organisasi, dan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil proses ini kepada manajemen”.

“Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi”.

Secara sederhana audit lingkungan merupakan suatu proses evaluasi. Namun dalam rangka menjamin proses evaluasi tersebut akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka suatu audit lingkungan harus dilakukan secara sistematis, terdokumentasi dan melalui tahap verifikasi. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti secara efektif, hasil audit harus dapat dikomunikasikan kepada manajemen agar mendapat komitmen untuk upaya perbaikan di masa mendatang.

BAB 4

HUBUNGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN AKUNTANSI

Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran ekonomi para pemegang saham. Nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, terutama kinerja keuangan. Persepsi pelaku pasar saham atas rasio keuangan perusahaan menjadi salah satu penentu terpenting naik turun harga saham perusahaan. Harga saham ini menjadi komponen pokok dalam penetapan nilai perusahaan, misal rasio *Price Per Book Value* (PBV). Keharmonisan pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menjaga peranan dan fungsi. Pemangku kepentingan harus menciptakan pola hubungan yang kondusif dalam meningkatkan nilai perusahaan. Pemegang saham, kreditor dan manajer adalah pihak yang memiliki kepentingan dan perspektif berkenaan dengan perusahaan. Pemegang saham cenderung memaksimalkan nilai saham dan memaksa manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka melalui pengawasan yang mereka lakukan.

Kreditor di sisi lain cenderung akan berusaha melindungi dana yang sudah mereka investasikan dalam perusahaan dengan jaminan, juga melalui kebijakan pengawasan yang ketat. Manajer juga memiliki dorongan untuk mengejar target-target pengelolaan perusahaan sesuai dengan harapan yang mereka kehendaki. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan perusahaan. Hubungan kondusif *stakeholder* prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan.

GCG akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan kepentingan pemangku lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian bahwa GCG terkait erat dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Implementasi GCG secara konsisten pada prinsip ditujukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta diterapkan untuk memperkuat daya saing perusahaan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, implementasi GCG menjadi penting untuk memenangkan persaingan bisnis dengan tetap mengedepankan persaingan. GCG hendaknya tidak hanya dipandang sebagai sebuah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap sejumlah peraturan yang mendorong praktik dan hubungan bisnis agar penerapan GCG yang baik telah mengakomodir kebutuhan dunia usaha yang dinamis. GCG hendaknya dipandang sebagai sebuah bentuk kesadaran dan untuk menjalani persaingan bisnis yang beretika. Penerapan GCG dapat dilihat dari implementasi konsep etika.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tahun 2001 mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut *The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan. GCG sebagai suatu sistem,

proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien. Nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Beberapa sumber tulisan yang membahas mengenai hal positif yang dapat diharapkan dari penerapan GCG dalam jangka panjang terhadap perusahaan, sebagai berikut:

1. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan efektif.
2. Mengurangi *cost of capital*, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan.
4. Menciptakan dukungan *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

GCG dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dengan menerapkan prinsip: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai etika. Praktik GCG konsisten dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar GCG. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa

benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran yaitu perlakuan adil dan setara para pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas. Komitmen untuk mewujudkan nilai perusahaan setiap aktivitas bisnis, menjadi penggerak utama pertumbuhan perusahaan. Komitmen untuk mewujudkan nilai perusahaan di setiap aktivitas bisnis menjadi penggerak utama pertumbuhan suatu perusahaan yaitu dengan menerapkan nilai dan melaksanakan program peningkatan mutu produk atau layanan secara berkesinambungan dengan menerapkan strategi perusahaan. Kombinasi antara nilai perusahaan, konsistensi penerapan program peningkatan kualitas produk atau layanan, dan untuk melakukan *continuous improvement*, serta penerapan GCG lingkup perusahaan menjadi pondasi yang kokoh bagi perusahaan untuk bertahan menghadapi segala tantangan dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dibutuhkan faktor pendukung internal dan strategi.

Selain itu, untuk menyikapi setiap perubahan yang terjadi di lingkup eksternal termasuk peranan GCG dalam aktivitas keseharian secara konsisten, dan sikap integritas. Sikap integritas terwujud bila pedoman perilaku dan etika usaha yang disusun berlandaskan nilai perusahaan dalam melaksanakan misi dan visi perusahaan. Perilaku dan etika perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang memenuhi prinsip GCG bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan dan melaksanakan peran dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Pedoman Perilaku merupakan bagian dari pelaksanaan GCG tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari oleh seluruh karyawan perusahaan sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip GCG (transaparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness/keadilan). Mengingat lingkungan bisnis yang sangat

dinamis, maka perlu dikaji pedoman perilaku secara berkesinambungan dalam rangka mendapatkan standar kerja yang efisien. Etika usaha merupakan standar perilaku yang diharapkan perusahaan dalam berinteraksi dan terhubung dengan pemangku kepentingan) karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, pemegang saham, media, pesaing, dan masyarakat sekitar). Untuk menjamin kelangsungan usaha dan keberhasilan sebagai perusahaan yang kompetitif bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang etis dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkomitmen terhadap standar etika dan pelaksanaan peraturan perundangan, memahami dan mendukung pengembangan masyarakat setempat dengan menerapkan prinsip saling menghargai dan saling mengembangkan, dan mendukung pelestarian lingkungan perusahaan.

BAB 5

HUBUNGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DENGAN AKUNTANSI

Kerusakan lingkungan, *global warming* dan *climate change*. Analisis menunjukkan peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih banyak berbasis pada sumber daya alam, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya. Sebut saja minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, emas, dan sumber daya alam lainnya. Aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan sering kali terabaikan, seperti pencemaran air dan udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian dan sebagainya.

Kondisi demikian pada akhirnya menjadikan semakin menurunnya produktifitas sumber daya alam dan lingkungan sehingga mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan pada masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Berbagai pihak menuding, penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan termaksud adalah akibat dari strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Strategi dan kebijakan pembangunan nasional lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomi semata dibandingkan dengan kepentingan lingkungan dan masyarakat (Lako, 2015).

Bahkan, lingkungan dan seluruh sumber daya alam yang melekat padanya serta sumberdaya ekonomi masyarakat diakuisisi dan dieksploitasi secara berlebihan oleh negara dan para pelaku ekonomi untuk mewujudkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan laba semata. Meski di satu sisi pertumbuhan laba korporasi dan pertumbuhan ekonomi negara terus meningkat (EN), namun pada saat yang sama, eskalasi krisis sosial dan krisis lingkungan (EKSL) semakin meningkat pula. Permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul justru kian kompleks dan membahayakan. Fenomena ini sering disebut sebagai “*paradoks pertumbuhan ekonomi*” yang dihasilkan dari perilaku ekonomi yang tamak (*greedy economy*) (Lako, 2015). Sementara itu, titik ideal pertumbuhan ekonomi negara (daerah) ketika kenaikan tingkat ekonomi negara (EN) diikuti dengan menurun ESKL. Sebagai daerah yang berkembang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.

Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator pembangunan daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari daerah untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznetz dalam Todaro, 2004). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp75,83 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp53,95 triliun.

Sementara itu PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencapai Rp50,93 juta. Secara umum, ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan adalah 3 (tiga) lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sektor kehutanan dan pertambangan yang menjadi penopang PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kontribusi signifikan terhadap kerusakan alam. Pada tahun 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, terdapat 200 ribu dari 654 ribu hektare atau sekitar 30% total kawasan hutan mengalami kerusakan akibat dari penambangan bijih timah ilegal dan penebangan hutan liar. Merujuk dari laporan tersebut, kerusakan kawasan hutan tersebut sudah cukup memprihatinkan dan telah mengganggu kelestarian lingkungan di Provinsi penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia. Selain itu, kerusakan hutan menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, dan konflik sosial di masyarakat.

Emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan lahan gambut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan emisi terbesar, terjadi akibat kebakaran lahan gambut. Faktor yang menyebabkan kebakaran lahan gambut diantaranya adalah sengaja dibakar untuk mengolah lahan gambut atau tidak disengaja karena kekeringan lahan gambut itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pembangunan yang terjadi di Bangka Belitung cukup besar sehingga membutuhkan lahan gambut untuk terjadinya pembangunan. (Pradityo, 2011). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan.

Untuk karena itu, paradigma ekonomi hijau perlu dikedepankan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan harus didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future*, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai *development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga untuk masa-masa mendatang.

Perkembangannya, dengan semakin gencarnya pembangunan berkelanjutan, maka berkembanglah konsep ekonomi hijau (*green economy*), sebagai konsep yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Namun mengingat tidak adanya model pembangunan berkelanjutan yang sama untuk seluruh negara, maka konsep ekonomi hijau dipahami secara berbeda pula, dengan mempertimbangkan berbagai kendala pada masing-masing negara. Secara sederhana, pengertian ekonomi hijau dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Sementara itu, *United Nation Environment Programme* (UNEP) mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dengan memberikan pengertian bahwa:

“Greening the economy refers to the process of reconfiguring business and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities.”

Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial dengan tetap mengurangi resiko-resiko kerusakan lingkungan dan ekologi (Wanggai, 2012:7). Dalam hal inilah esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi yang berbasis pembangunan berkelanjutan. *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam laporan yang berjudul *Our Common Future* mengidentifikasi beberapa masalah kritis yang perlu dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan lingkungan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu:

- 1) Mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas;
- 2) Mendapatkan kebutuhan pokok mengenai pekerjaan, makanan, energi, air dan sanitasi;
- 3) Menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan;
- 4) Melakukan konservasi dan kemampuan sumber daya ;
- 5) Orientasi teknologi dan mengelola risiko;
- 6) Memadukan pertimbangan lingkungan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan.

Perkembanglah kemudian konsep ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau (*green economy*) menjadi paradigma dalam pembangunan berkelanjutan yang penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Mumbunan (2012) menyebutkan bahwa, ekonomi hijau menjadi jawaban dari ekonomi coklat, yaitu kegiatan ekonomi yang memproduksi banyak karbon. Ekonomi coklat merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan energi secara tidak efisien (boros) tetapi secara sosial tidak cukup inklusif, yaitu tidak melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang dan mineral batu bara misalnya, kegiatan ekonomi coklat sangat dominan. Selain berdampak buruk pada kualitas lingkungan, munculnya kasus-kasus pertambangan di Freeport atau Newmont menunjukkan bahwa secara sosial masih sangat eksklusif, tidak mewujudkan keadilan sosial. Manfaat dari eksploitasi tambang tersebut sebagian besar dinikmati hanya oleh sebagian kecil orang/kelompok dalam bentuk izin atau hak-hak pemanfaatan yang diperolehnya. Padahal dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut justru ditanggung oleh masyarakat sekitar yang menanggung kerusakan lingkungan.

Hal inilah yang ingin diminimalisir/dihindari melalui pembangunan berparadigma ekonomi hijau (*green economy*). Ekonomi hijau menurut Cato (2009), mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:

- 1) Ekonomi yang berbasis lokal.
- 2) Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan di mana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang.
- 3) Melibatkan distribusi aset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak *capital gain*.

- 4) Pajak digunakan juga secara strategis untuk keberlanjutan pembangunan, bukan untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis.
- 5) Dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang.
- 6) Meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi *steady-state*.
- 7) Ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi.
- 8) Memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung.
- 9) Sistem kesehatan yang fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal daripada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas.
- 10) Menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan pertanian organik dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas.

Sebagaimana telah disebutkan di awal, dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sebagai salah satu upaya untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ekonomi hijau (*green economy*) merupakan hal yang penting untuk dikedepankan dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang dan menjadi *legacy* positif yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memulai implementasi pembangunan ekonomi hijau. Perumusan beberapa pendekatan tersebut sebagai langkah awal sekaligus memberikan pondasi agar implementasi pembangunan ekonomi hijau dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu dekat.

Tabel 1. Indikator G4

Katagori	Jumlah Kode	Keterangan
Ekonomi	10	a) Kinerja ekonomi b) Keberadaan pasar c) Dampak ekonomi tidak langsung d) Praktek pengadaan
Lingkungan	25	a) Bahan b) Energi c) Air d) Keanekaragaman hayati e) Emisi f) Efisien dan limbah g) Produk dan jasa h) Kepatuhan i) Transportasi j) Lain-lain k) Asesmen pemasok atas lingkungan
Sosial	56	a) Kepegawaian b) Hubungan industrial c) Kesehatan dan keselamatan kerja d) Pelatihan dan pendidikan e) Keberagaman dan kesetaraan peluang f) Kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki g) Asesmen pemasok terkait praktik ketenagakerjaan h) Investasi

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. Ojeka, S. Alabi, O. Alo, U. & Aini, U. (2020). Audit Committe Characteristics and Sustainability Performance in Negerian Listed Banks. *Busness Theory and Practice*, Volume 21 Issue 2: 469-476.
- Ahmed, D. A. H., Eliwa, Y., & Power, D. M. (2019). The impact of corporate social and environmental practices on the cost of equity capital: UK evidence. *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(3), 425–441. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-11-2017-0141>
- Akisik, G. Fruente, G. D. L. & Valasco, P. (2011). Bank Debt Signalling and Corporate Sustainability: Dose Incongruence Blur the Message?. *Finance Research Letters*, 289, 134-145.
- Andi, D. & Putra, M. A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2015. *Journal Of Business Strategy*, Vol. 1 No. 1, 435-443.
- Angelo, L. Elizabeth. (1981). Audit Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economic*, Volome 3, Issue 3, 1234-1241.
- Anwar, K. Tiwari, M. & Khan, M. S. (2020). *Sustainability Accounting and reporting in the Industri 4.0*. *Journal oc Cleaner Production*, 258, 1207-1218.
- ASEAN Secretariat. 2018. Think Globally, Prospering Regionally: ASEAN Economic Community 2015. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat. http://www.miti.gov.my/miti/resources/fileupload/AEC_KeyMessagesBooklet.pdf Diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

- Balsam, L. L. Hung, P. H. Chou, D. W. & lai, W. C. (2017). *Financial Performance and Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Taiwan*. *Asia Pacific Management Review*, 24, 61-71.
- Balsam, M. Nguyen, T. & Quang, T. T. (2018). The Effects of Corporate Social Responsibility on firm Efficiency: Inside the Matrix of Corporate Finance. *Finance Research Letters*, 789, 178-189.
- Balsam, L. E. Hickman, Iyer, S. R. & Jadiyahpa. N. (2019). The Effect of Voluntary and Mandatory on Earnings Management: Evidence from India and the 2% Rule. *Emerging Markets Review*, 46, 100750.
- Balsam, Y. Yang, Y. Su, X. Yao, S. (2020). *Nexus Between Green Financial, Fintech, and High-Quality Economic Development: Empirical Evidence from China*. *Resources Policy*, 74, 100-2445.
- Barkat, L. Liu, Y. Chen, Y. Ren, Y. & Jin, B. (2012). Impact Mechanism of Corporate Social Responsibility on Sustainable Technological Innovation Performance from the Perspective of Corporate Social Capital. *Journal of Cleaner Production*, 308, 127-145.
- Becker, W. Xing, C. Zang, Y. & Tripe, D. (2018). Green Credit Policy and Corporate Access to Bank Loans in China: the Role of Environmental Disclosure and Green Innovation. *Internasional Review of Financial Analysis*, 77, 101-135.
- Bergh, L. Gillan, L. S. Koch, A. & Starks, L. T. (2014). Firms and Social Responsibility: A Review of ESG and CSR Research in Corporate Finance. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101-819.
- Beasey. K & Petrono. (2010). Corporate Social Responsibility and firm value: Guiding Through Economic Policy Uncertainty. *Financial Research Letters*, 35, 101-153.

- Bessler, C. Chao, A. C. Lucheng, & Hang. (2011). Corporate Social Responsibility Strategy, Environment and Energy Polic. *Structural Change and Economic Dynmics*, 51, 311-317.
- Benlemlih, M. (2021). Corporate Social Responcibility and Dividend Policy. *Research in Internasional Business and Finance*, 47, 114-138.
- Bhunia, S. Mqbool, S. & Zameer, N. W. (2011). Corporate Social Responsibility and Financial Performance: An Empirical Analysis of Indian Banks. *Future Busineus Journal* 4, 84-93.
- Bhatnagar, Z. Guangyou, Z. Sun, Y. Lou, S. & Liao, J. (2019). Corporate Social Responsibility and Bank Financial Performance in China: The Moderating Role of Green Credit. *Energy Economics*, 97, 105-190.
- Brigham & Hasan. (2021). Board Gender Diversity and Corporate Social Responsibility: Is There a Case for Critical Mass?. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123-379.
- Brigham & Haston. (2021). Effect of Corporate Social Responsibility Towards Stakeholders and Environmental Management on Responsible Innovation and Competitiveness. *Journal of Cleaner Production*, 250, 119-139.
- Chen, T. Dong, H. & Lin, C. (2016). Institutional Sharekolders and Corporate Social Responsibility. *Journal of Financial Economic*, 135, 483-504.
- Chen, & Zang. (2021). How does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Equity Capital Through Operating Risk. *Borsa Intanbul Riview*, S38-S45.
- Chen, B., & Zhang, A. (2021). How does corporate social responsibility affect the COE capital through operating

- Christiawan. (2019). Can Green Credit Policy Improve Environmental Quality? Evidence From China. *Journal of Environmental Management.*, 250, 113-145.
- Coffie, T. T. Huan, N. C. W. Hong, T. T. T. & Tran, D. K. (2021). The Contribution of Corporate Social Responsibility on SMEs Performance in Emerging Country. *Journal of Cleaner Production*, 322, 129-143.
- Connelly, O. M. Dragomir, V. D. & Feleaga, L. (2011). The Relationship Between Environmental, Social, and Financial Performance, in the Banking Sector: A European Study. *Journal of Cleaner Production*, 290, 1125-1191.
- Connelly, C. Seraina, C. Anagnostopoulau, Tsekrekos, A. E, & Voulgaris, G. (2011). Accounting Conservatism and Corporate Social Responsibility. *The British Accounting Review*, 53, 1100-1142.
- Craswel, Liu, J. & Lai, K. H. (2009). Corporate Social Responsibility Practices and Performance Improvement Among Chinese National State-Owned Enterprises. *Int. J. Production Economics*. 171, 417-425.
- Ghaul, T. T. Anggono, A. Yuliana, R. Prasetyono, P. Syarif, M. Wildan, M. A. & Kusufi, M. S. (2011). Corporate Social Responsibility, Financial Fraud, and Firm's in Indonesia and Malaysia. *Heliyon*, 8, 4098-4121.
- Goul, Machmudduh, Z. Saf, D. W. & Utomo, D. (2017). Corporate Social Responsibility, Profitability and Nilai perusahaan: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol 7, No 9, 631-638.
- Ghul., Y. Hu, Y. Chen, S. Yuexin. & Goue, S. (2019). CSR and firm value: Evidence from China. *Sustainability*, 10, 4597-4601

- Gomes, X. Xu, S. Chen, X. Li, A. & Xia, X. (2019). Disclosure for whom? Government Involvement, CSR Disclosure and firm value. *Emerging Markets Review*, 44, 1007-1017.
- Haston. (2018). Do CSR Activities Increase Nilai perusahaan? Evidence From the Korean Market. *Sustainability*, 10, 5597-5610.
- Haston. (2018). Effect to Entry into Socially Responsible Investment Index on Cost of Equity and Nilai perusahaan. *Sustainability*, 10, 6103-6091.
- Hagg & Scheutz. (2016). Halo Effect or Fallen Angel Effect? Nilai perusahaan Consequences of Greenhouse Gas Emissions and Reputation for Corporate Social Responsibility. *Journal of Accounting and Public Policy*, 91, 145-157.
- Hulk, K. Nugroho, B. Y. & Helk, Z. (2019). Corporate Governance Mechanism and Cost of Capital to Fimr Value. *International Jounal of Innovations, Creativity and Cange, Volume*. 13, Issue 6, 1231-1242.
- Hermuningsih. (2013). Did Mandatory IFRS Adoption Affect the Cost of Capital in Latin American Countries?. *Journal of International Accounting, Auditing and taxation*, 38, 100301-100321.
- Hogan. R & Jeter. W (2017). Does Debt Structure Heterogeneity Reduce the Cost of Capital?. *Original Artikel*, 89, 1856-1866.
- Jezkova, K. Junior, L. M. C. Fonseca, A. J. D. S. Castro, R. Mello, J. C. D. O. & Santos, V. H. R. D. (2020). Empirical Evidence of the Cost of Capital Under Risk Conditions for Thermoelectric Power Plantis in Brazil. *Energies*, 13, 4313.-4323.
- Jezkova, K. Junior, L. M. C. Fonseca, A. J. D. S. & Santos, V. H. R. D. (2020). The Cost of Capital Under Risk Conditions

- for Thermoelectric Power Plantis in Brazil. *Energies*, 13, 4333-43343.
- Jensen, M. C & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Economics*, Volume 3, 305-360.
- Kaaro. (2020). Economic Policy Uncertainty, Ciost of Capital, and Corporate Innovation. *Journal Pre-proof*, 41, 378-4266.
- Katchova & Enlow. (2017). Impact of CSR on Cost of Debt and Cost of Capital: Australian Evidence. *Social Responsibility Journal*, 12, 1747-1117.
- Khosravi, K. Pham, B. T. Chapi, K. Shirzadi, A. Shahabi, H. Revhuang, I. Prakash, I. & Bue, D. T. (2019). A Comparative Assessment of Decision Trees Algorithms for Flash Flood Susceptibility Modeling at Haraz Watershed, Northern Iran. *Science of the Total Environment*, Volume 627, Pages 744-755.
- King, H. C. & Wang, Y. H. (2020). Cost of Capital and firm value: Evidence from Pakistan dan India. *Busines Perspectives*, Volome 13, Issue 1, 1234-1242.
- Khurana. O & Raman. R. (2016). Corporate Social Responsibility, Non-Financial Reporting and Company Performance: Relationships and Mediating Effects in Spanis Small and Medium Sized Enterprises. *Sustainable Production and Consumption*, 15, 349-364.
- Krishnan, (2018). Economics or Ethics? Exploring the Role of CSR Expectations in Explaining Consumers' Perceptions, motivations, and Akcive Communication Behaviors About Corporate Misconduct. *Public Relations Review*, Volume 45, Issue 1, 232-247.
- Kurniasih, A. Rustma, M. & Endri, E. (2022). Cost of Capital and firm value: Evidence from Indonesia. *Busines Perspectives*, Volome 19, Issue 4, 1456-1465.

- Kolk, A. (2010). The Social Responsibility of Internasional Business: From Ehics and the Enveronment to CSR and Sustainable Development. *Journal of World Business*, 51, 23-34.
- Le, T. T. Huan, N. Q. Hoang, T. T. T. & Tran, D. Khoan. (2017). The Contribution of Corporate Social Responsibility on SMEs Perperformace in Emerging Country. *Journal of Cleaner Production*, 322, 1291-12103.
- Lopez, M. V. Garcia, A. & Rodrigue, L. (2007). Sustainable Development and Corporate Performance: A Studi Based on the Dow Jones Sustainability Index. *Journal of Business Ethics*, 75, 285-300.
- Manten, Bosede, N. A. & Michael. (2013). How Does Social Responsibility Affect Financial Performance, Financial Stability, and Financial Inclusion in the Manufacturing? Evidence From Pakistan. *Research in Internasional Busines and Finance*, 75, 1313-1324.
- Marcelino & Harsono. (2017). Cost of Capital, Corporate Tax Plannings, and Corporate Social Responsibility Disclosure. *Journal Accounting, Volume XXVI*, No. 01, 146-159.
- Marcelino. (2019). Cost of Capital, Corporate Tax Plannings, and Corporate Social Responsibility Disclosure: India and Indonesia. *Journal Accounting, Volume xxxvl*, No. 04, 1345-1355.
- Mayhe. Y & Wilkins. P. (2013). Does Lack of Choice Lead to Lower Quality? Evidence from Auditor Competition and Client Restatements. *Amarican Accounting Assocation*, 32 (3): 31-62.
- Mayhew, Y. & Wilkins, P. (2019). Audit Partner Industry Specialization and the Cost of Capital Debt: Evidence from Thailand. *Amarican Accounting Assocation*, 21 (3): 127-146.

- Miller, M. A. S. C. M. (2021). Subcutaneous Levetiracetam for the Management of Suizures at the end of Life: An Audit and Updated Literature Review. *Journal of Paloative Medicine*, Vol. 24, No 7, 1567-1577.
- Ness, L. M. K. S. N. (1992). Is Computed tomography of the Body Overused? An Audit of 2068 Attendances in a large acute hospital. *Journal Management and Accounting*, Vol. 69, No. 818, 156-166.
- Nguyen, P. L. H. K. (2018). Exploring Market Orientation, Innovation, and Financial Performance in Agricultural Value Chains in Emerging Economies. *Journal of Innovation & Knowledge*, Volome 3, Issue 3, 123-133.
- Nugrahani,, T. S. (2017). The Effect Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Corporate Governance (GCG) to Earning Per Share (EPS). *Journal Accounting and Management*, Vol. 19, No. 1, 156-169.
- Oikonomou, I. Brooks, C. & Pavelin, S. (2014). *The Effects of Corporate Social Performance on the Cost of Corporate Debt and Credit Ratings*. *Financial Review*, Volome 49, Issue 1, 199-124.
- Okafor, A. Bosede, N. A. & Michael, A. (2021). Cororate Social Responsibility and Financial Performance: from U.S Tech Firm. *Journal of Cleaner Prodution*, 265, 1260-1278.
- Owhoso, S. Yonathan, K. & Surnok. P. (2017). Auditor's Experience, Professional Commitment, and Knowledge on Financial Audit Performance in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8 (2), 191-199.
- Owhoso, S. Yonathan, K. & Surnok. P. (2019). Auditor's Experience, Professional Commitment, and Knowledge on Financial Audit Performance and Cost of Capitalin Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8 (2), 191-199.

- Rahmawati, S & Qomariyah. (2017). The Effect of International Asymmetry, Business Diversification on the Cost of Equity Capital with Managerial Ownership as a Mederating Variable. *Journal Resarch Accounting and Management*, Vol. 4. No. 3, 1345-1355.
- Ramadhan, R. K. Cahyo, D. & Afrah, I. K. F. (2017). Information Asymmetry and Profit Management on Cost of Equity. *The International Journal of Business Review*, Vol, 1, No. 1, 1456-1467.
- Ramzan, M. Muhammad, A. & Muhammad, A. (2021). How Does Social Responsibility Affect Financial Performance, Financial Stability, and Financial Inclusion in the Banking Sector? Evidence From Pakistan. *Research in Internasional Busines and Finance*, 55, 1013-1028.
- Raimo, K. H. (2020). The Influences of Information Asymmetry, Size, and Financial Rations on Earning Management Towars Banking Sector. *Journal Economis and Business*, Vol. 20, No. 3, 1345-1359.
- Sanusi, Anwar (2011). *Metode Penelitian Bisnis Disertasi Contoh Proposal Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Samuel. (2017). The Influence of Audit and Financial Employee Performance: A Mediating Cost of Capital. *Journal Economic dan Business*, Vol. 12, No. 1, 1456-1470.
- Samuel, H. P. (2019). Financial performance and corporate social responsibility: Empirical evidence from Taiwan. *Asia Pacific Management Review*, 61-71.
- Simunic, M. D. (2018). Does Relative (absolute) Efficiency Affect Capital Costs?. *Business Analytics and Operations Research*, Vol. 2, 1037-1060.
- Suciati, G. B. (2023). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Response

- Coefficient. *Jurnal Akuntansi Internasional*. Vol. 3, No. 3, 2023, 1991-1201.
- Suarjaya. (2017). Cost of Capital, Corporate Tax Planning, and Corporate Social Responsibility Disclosure. *Journal Accounting*, Vol. 3, Issue, 124-345.
- Suchman, M. C (2019). Manajemen Keuangan, Teori dan Praktik. Edisi 2. Surabaya Erlangga.
- Sutriningsih, I. Wiyanto, A. & Hengky. (2019). The Mediting Effect of Company Performance on the Relationship Between Capital Strucure and Nilai perusahaan in Food and Beverage Industry. *Journal Adminitional Risch*, Volume 11, Nomor 2, 1921-1940.
- Suprijanto. A (2021). Damapak Globalisasi Terhadap Perekonomian Global. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. Volume 1, No. 2, Juli 2021, 134-144.
- Qiu, S. C., Jiang, J. Liu, X., Chen, M. H., & Yuan, X. (2021). Can Corporate Social Responsibility Protect Nilai perusahaan During the Covid-19 Pandemic?. *Internasional Journal of Hospitality Management*, 93, 1027-1049.
- Rianingtyas, Y. S & Trisnawati, A. P. (2017). Financial Performance and Nilai perusahaan Lesson from Mining Sub-Sector Companies on the Indonesia Stock Exchange. *Journal Accounting and Management*, Volume. 3, Nomor. 3, 1345-1359.
- Tanushi, K. & Khan, M. M. (2019). Sustainability Accounting and Reporting in the Industry 4.0. *Journal oc Cleaner Production*, 258, 1207-1218.
- Taufiq, M. K. & Arifa, N. A. (2017). Nilai perusahaan, *Capital Structure, Profitability, Fimr Characteristic and Disposable Income As Moderator: an emirical Investigation of Retail Firm in Indonesia*. *Journal Innovation, Accounting, and Managmeent*, Vol 7, No. 1, 1988-1998.

- Titisari, K. H, Moeljadi, M, Ratnawati, K, & Indrawati, N, K. (2019). The Roles of Capital, Corporate Governance, and Corporate Social Responsibility in improving nilai perusahaan: from Indonesia. *Bussiness Perspectives*, Volume 16, Issue 4, 1345-1359.
- Wang, R. B. & Huang, H. H. (2018). Independent Director Attention and the Cost of Equity Capital. *Journal of Business Financial & Accounting*, Volume 48, Issue 7-8, 177-184.
- Wang, R. B. Boucher, O. Cias, P. Schuster, G. L. & Lhevallier, F. (2020). Does Corporate Social Responsibility Affect Cost of Capital in China dan Indonesia?. *Asia Pacific Management Review*, Volume 25, Issue 1, 133-149.
- Wang, R. B. (2020). Economic Policy Uncertainty and the Cost of Capital. *Internasional Riview of Financial.*, Volume 81, 1567.1577.
- Wang, R. B. (2022). Research on the Effect of Executive Incentive Institutional Innovation on the Cos of Equity- Evidence from Chinese Listed Companies. *International Riview of Financial*. Volume 85, Issue 2, 166.178.
- Wats & Zimmerman. (1986). Financial Accounting Numbers Affect Such Flows Via Contracts, Taxes, Agency Costs, and in some Cases Regulation. *Asian Review of Accounting*, Volme 2, Issue 9, 145-157.
- Witjaksono & Djaddang, (2018). Firm Size, Disclosure and Cost of Equity Capital. *Asian Review of Accounting*, volume 2, Issue 3, 188.193.
- William, K. Krisnan, L. Li, Q. & Wang, Q. (2017). Auditor Industry Expertise and Cost of Equity. *Accounting Horizon*, Volume 3, Issue 27, 167-176.
- William, A. J. R. M. W (2018). Social Disclosure, Financial Disclosure and the Cost of Equity Capital. *Accounting*,

- Organizations and Society*, Volume 26, Issues 7-9, 1567-1577.
- Wong, H. L (2019). The Impact of Voluntary Corporate Disclosures on the ex-ante Cost of Capital for Swiss Firms. *European Accounting Review*, Volume 11, Issue 4, 167-179.
- Xu, S. N. Azim, M. & Jubb C. A. (2015). Risk Disclosure, Cost of Capital and Bank Performance. *International Journal of Accounting & Information*, Volume 3, Issue 5, 145-159.
- Xu, S. N. Kothari, S. P. Li, X. & James, E. (2019). The Effect of Disclosures by Management, Analysts, and Business Press on Cost of Capital, Return Volatility, and Analyst Forecasts: A Study Using Content Analysis. *The Accounting Review*, Volume 3, Issue 4, 145-159.
- Yeh, C. C, Fengyi. L, Teng. S. W, & Chia, M. W. (2020). Does Corporate Social Responsibility Affect Cost of Capital in China?. *Asia Pacific Management Review*, 25, 1-12.
- Zahro, M. E. S. (2019). The Combined Effect of Financial Derivatives and Discretionary Accruals on the Value Relevance and Book Value of Equity. *Gadjah Mada International Journal of Business*, Volume 2, Issue 01, 176-189.
- Zenovia. L & Ance. G. (2009). Financial Disclosure and the Cost of Equity Capital: the Empirical Test of the Largest Listed Companies of Kazakhstan. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol 4. No 3, 192-1109.
- Zhang, K. Li, Y. Qi, Y. & Shao, S. (2021). Can Green Credit Policy Improve Environmental Quality? Evidence From China. *Journal of Environmental Management*, 298, 1134-1145.

Biografi Penulis



Penulis kelahiran di Pasuruan, 18 November 1985 masa pendidikan penulis SD s/d SMA di Pasuruan. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2004 s/d 2008, S2 Magister Saint Akuntansi Universitas Brawijaya tahun 2015 s/d 2016, dan melanjutkan ke S3 Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang tahun 2021 s/d 2024. Gelar yang di sandang oleh penulis Dr. Abd Rohman Taufiq., S.E., M.S.A., Ak., CA., CSRS., CSRA., CMA., CIBA., CERA. Penulis adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang akuntansi dengan spesialisasi dalam Akuntansi Manajemen terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG), dan Akuntansi Lingkungan. Saat ini penulis dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun (UNIPMA). Penulis juga Asesor di beberapa perusahaan yang menangani *Annual Report* dan *responsibility report*. Keterlibatan penulis dalam organisasi sosial terutama dalam pengelolaan limbah plastik dan emisi karbon. Memulai buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang *Corporate Governance & Corporate Social Responsibility* (CSR) Pendukung Akuntansi. Penulis berharap agar perusahaan yang melakukan aktivitas operasional yang bahan bakar dan menghasilkan polusi udara yang kurang baik, sebaiknya menerapkan program CSR sesuai dengan konsep GCG dalam penerapan akuntansi yang seutuhnya. Penulis dalam beberapa tahun belakangan ini menulis dengan tema CSR dan GCG sebagai menguat dalam melestarikan lingkungan untuk mewujudkan Indonesai Emas tahun 2045.



Media Kunkun Nusantara adalah penerbit Indie dan percetakan yang berkedudukan di Kec. Patrang Kab. Jember – Jawa Timur.

Menerbitkan dan mencetak buku fiksi maupun non fiksi, majalah dan sejenisnya, dengan kualitas standart toko buku nasional.

Tertarik? Silakan Chat WA 081559852272



Buku ini mengulas secara komprehensif hubungan antara Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pilar utama dalam mendukung praktik akuntansi yang transparan, akuntabel, dan beretika. Di era modern, tuntutan terhadap perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga mencakup perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Buku ini membahas konsep dasar GCG, mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pembahasan dilanjutkan dengan konsep CSR, yang meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Buku ini juga menyoroti bagaimana GCG dan CSR dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Pada intinya, buku ini menjelaskan peran akuntansi sebagai alat pengukuran dan pelaporan kinerja GCG dan CSR. Dengan adanya standar akuntansi yang jelas, perusahaan dapat menyusun laporan keberlanjutan (sustainability report) yang relevan dan dapat dipercaya. Selain itu, disajikan pula studi kasus tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar berhasil mengintegrasikan GCG dan CSR dalam sistem akuntansi mereka.

Terakhir, buku ini memperkenalkan tantangan dan peluang di masa depan terkait penerapan GCG dan CSR, termasuk peran teknologi dan regulasi internasional. Ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi akuntansi, serta pemangku kepentingan lainnya, buku ini menawarkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya sinergi antara GCG, CSR, dan akuntansi dalam mendukung keberlanjutan perusahaan serta pengelolaan risiko yang lebih baik.



Media Kunkun Nusantara

Cetak Mimpi terbitkan Inspirasi

Perum Queen Cempaka Blok C No 30 Kel. Gebang
Kec. Patrang Kab. Jember. 68117 Prov. Jawa Timur
No. WA. 081559852272 || No. IKAPI : 425/JTI/2024

ISBN 978-623-10-6288-8



9

786231

062888